

FORMULIR ISIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Nama Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Unit Kerja Pembuat Informasi	Penanggung Jawab Pembuat Informasi	Bentuk Informasi		Retensi Arsip	Klasifikasi Informasi
					Hard Copy	Soft Copy		
G. Badan Karantina Pertanian								
1.	Sejarah Badan Karantina Pertanian	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas			v	Berlaku Selamanya	BK
2.	Profil Badan Karantina Pertanian	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Periode Berganti	BK
3.	Struktur dan Pejabat Badan Karantina Pertanian	Jakarta, Juni 2016	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Periode Berganti	BK
4.	Prosedur Rencana Tindakan Darurat Kebakaran di Gedung Pemerintah	Jakarta, Desember 2005	Biro Umum			v	Hingga Periode Berganti	BK

5.	Tata Cara permohonan Informasi Publik sesuai peraturan menteri pertanian	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Periode Berganti	BK
6.	Prosedur Permohonan Informasi Publik	Jakarta, Januari 2016	Bagian Hukum dan Humas		v	v	Hingga Periode Berganti	BK
7.	Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
8.	Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Pertanian	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
9.	IKM Semester I Tahun 2015	Jakarta, Juli 2015	Bagian Umum		v	v	6 bulan	BK
10.	IKM Semester II Tahun 2015	Jakarta, Januari 2016	Bagian Umum		v	v	6 bulan	BK
11.	IKM Semester I Tahun 2016	Jakarta, Juli 2016	Bagian Umum			v	6 bulan	BK

12.	Unit Layanan Pengadaan (LPSE) Barantan	Jakarta	Bidang Informasi Perkarantinaan			v	Hingga Periode Berganti	BK
13.	Pengaduan Masyarakat	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Periode Berganti	BK
14.	Siaran Pers dan Keterangan Pers	Jakarta	Bagian Hukum dan Humas			v	Berlaku Selamanya	SS
15.	Standart Operasional Procedure (SOP) Administrasi	Jakarta, Juni 2014	Bagian Umum		v	v	Hingga Masa Berlakunya	SS
16.	Renstra 2015 – 2019	Jakarta, Desember 2014	Bagian Perencanaan		v	v	5 tahun	SS
17.	Pemantauan Indikator Kinerja Kegiatan Lingkup Badan Karantina Pertanian Tahun 2016	Jakarta, Januari 2016	Bagian Perencanaan			v	1 tahun	BK
18.	Penetapan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2011	Jakarta, Februari 2011	Bagian Perencanaan		v	v	1 tahun	BK

19.	Penetapan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2012	Jakarta, Februari 2012	Bagian Perencanaan		v	v	1 tahun	BK
20.	Penetapan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2013	Jakarta, Februari 2013	Bagian Perencanaan		v	v	1 tahun	BK
21.	Penetapan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2014	Jakarta, Februari 2014	Bagian Perencanaan		v	v	1 tahun	BK
22.	Penetapan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2015	Jakarta, Oktober 2015	Bagian Perencanaan		v	v	1 tahun	BK
23.	Penetapan Kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2016	Jakarta, 2016	Bagian Perencanaan		v	v	1 tahun	BK
24.	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2011	Jakarta, Januari 2012	Bagian Perencanaan		v	v	1 tahun	BK
25.	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2012	Jakarta, Januari 2013	Bagian Perencanaan		v	v	1 tahun	BK

26.	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2013	Jakarta, Januari 2014	Bagian Perencanaan		v	v	1 tahun	BK
27.	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian TA 2014	Jakarta, Januari 2015	Bagian Perencanaan		v	v	1 tahun	BK
28.	Laporan Tahunan Badan Karantina Pertanian T.A. 2015	Jakarta, Januari 2016	Bagian Perencanaan		v	v	1 tahun	BK
29.	LAKIP Badan Karantina Pertanian TA 2012	Jakarta, Januari 2013	Bagian Perencanaan		v	v	1 tahun	BK
30.	LAKIP Badan Karantina Pertanian TA 2013	Jakarta, Januari 2014	Bagian Perencanaan		v	v	1 tahun	BK
31.	LAKIP Badan Karantina Pertanian TA 2014	Jakarta, Januari 2015	Bagian Perencanaan		v	v	1 tahun	BK
32.	LAKIP Badan Karantina Pertanian TA 2015	Jakarta, Januari 2016	Bagian Perencanaan		v	v	1 tahun	BK

33.	Indikator Kinerja Semester I TA 2016	Jakarta, Juli 2016	Bagian Perencanaan			v	6 bulan	BK
34.	Laporan Realisasi Anggaran 2011	Jakarta, Mei 2012	Bagian Keuangan dan Perlengkapan			v	1 tahun	BK
35.	Laporan Realisasi Anggaran 2012	Jakarta, Mei 2013	Bagian Keuangan dan Perlengkapan			v	1 tahun	BK
36.	Laporan Realisasi Anggaran 2013	Jakarta, Mei 2014	Bagian Keuangan dan Perlengkapan			v	1 tahun	BK
37.	Laporan Realisasi Anggaran 2014	Jakarta, April 2015	Bagian Keuangan dan Perlengkapan			v	1 tahun	BK
38.	Laporan Realisasi Anggaran 2015	Jakarta, April 2016	Bagian Keuangan dan Perlengkapan			v	1 tahun	BK
39.	Laporan Neraca Keuangan TA 2011	Jakarta, Mei 2012	Bagian Keuangan dan Perlengkapan			v	1 tahun	BK

40.	Laporan Neraca Keuangan TA 2012	Jakarta, Mei 2013	Bagian Keuangan dan Perlengkapan			v	1 tahun	BK
41.	Laporan Neraca Keuangan TA 2013	Jakarta, Mei 2014	Bagian Keuangan dan Perlengkapan			v	1 tahun	BK
42.	Laporan Neraca Keuangan TA 2014	Jakarta, April 2015	Bagian Keuangan dan Perlengkapan			v	1 tahun	BK
43.	Laporan Neraca Keuangan TA 2015	Jakarta, April 2016	Bagian Keuangan dan Perlengkapan			v	1 tahun	BK
44.	Ringkasan Laporan Keuangan T.A. 2015	Jakarta, Januari 2016	Bagian Keuangan dan Perlengkapan		v	v	1 tahun	BK
45.	Laporan Neraca Keuangan Badan Karantina Pertanian Semester I TA 2016 (audited)	Jakarta, Juli 2016	Bagian Keuangan dan Perlengkapan			v	6 bulan	BK
46.	Laporan Realisasi Anggaran Badan Karantina Pertanian Semester I TA 2016 (audited)	Jakarta, Juli 2016	Bagian Keuangan dan Perlengkapan			v	6 bulan	BK

47.	Laporan Rekapitulasi Anggaran T.A. 2016	Jakarta	Bagian Keuangan dan Perlengkapan			v	1 tahun	BK
48.	Data Inventaris dan Aset Badan Karantina Pertanian	Jakarta, Mei 2016	Bagian Keuangan dan Perlengkapan			v	1 tahun	BK
49.	Tarif PNBP	Jakarta	Bagian Keuangan dan Perlengkapan			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
50.	Prosedur Ekspor Karantina Hewan		Bidang Keamanan Hayati Hewani			v		SM
51.	Prosedur Ekspor Hewan Hidup Primata		Bidang Karantina Hewan Hidup			v		SM
52.	Prosedur Ekspor Produk Hewan sarang wallet		Bidang Karantina Produk Hewan			v		SM
53.	Prosedur Impor Karantina Hewan		Bidang Keamanan Hayati Hewani			v		SM

54.	Prosedur Impor Hewan Hidup Sapi		Bidang Keamanan Hayati Hewani			v		SM
55.	Prosedur Impor Vaksin		Bidang Keamanan Hayati Hewani			v		SM
56.	Prosedur Antar Area Karantina Hewan		Bidang Keamanan Hayati Hewani			v		SM
57.	Alur Penetapan IKH dan IKPH		Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani			v		SM
58.	Pedoman HPHK		Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani			v		SM
59.	Prosedur Ekspor Benih		Bidang Karantina Tumbuhan Benih			v		SM
60.	Prosedur Impor Karantina Tumbuhan		Bidang Karantina Tumbuhan Benih			v		SM

61.	Prosedur Impor Benih		Bidang Karantina Tumbuhan Benih			v		SM
62.	Prosedur Pemasukan dan Pengeluaran Benih Antar Area		Bidang Karantina Tumbuhan Benih			v		SM
63.	Pedoman OPTK		Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati			v		SM
64.	Daftar Perusahaan PKE per May 2015		Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih			v		SM
65.	Daftar Perusahaan PKE per September 2016		Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih			v		SM
66.	Daftar Jenis Cemaran yang harus diuji dari Negara dengan Laboratorium Teregistrasi		Bidang Keamanan Hayati Nabati			v		SM
67.	Negara Dengan Laboratorium PSAT Teregistrasi		Bidang Keamanan Hayati Nabati			v		SM

68.	Analisis risiko terhadap komoditas Benih jagung asal Afrika Selatan		Bidang Karantina Tumbuhan Benih			v		SM
69.	Analisis risiko terhadap komoditas Buah Anggur asal Mexico		Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih			v		SM
70.	Analisis risiko terhadap komoditas Buah ceri asal Canada		Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih			v		SM
71.	Analisis risiko terhadap komoditas Buah jeruk asal Spanyol		Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih			v		SM
72.	Analisis risiko terhadap komoditas Kopi asal Nicaragua		Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih			v		SM
73.	Analisis risiko by pest yang telah dilakukan (<i>Pantoea stewartii</i>)		Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih			v		SM
74.	Analisis risiko by pest yang telah dilakukan (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>)					v		SM

75.	Analisis risiko by pest yang telah dilakukan (<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Michiganensis</i>)					v		SM
76.	Analisis risiko by pest yang telah dilakukan (<i>Aceria guerreronis</i>)					v		SM
77.	Analisis risiko by pest yang telah dilakukan (<i>Chaetocnema pulicaria</i>)					v		SM
78.	Analisis risiko by pest yang telah dilakukan (Nematoda sista kuning)					v		SM
79.	Analisis risiko by pest yang telah dilakukan (Lethal yellowing)		Bidang Karantina Tumbuhan Non Benih			v		SM
80.	Analisis risiko by pest yang telah dilakukan (Barley Yellow Dwarf Virus)					v		SM
81.	Analisis risiko by pest yang telah dilakukan (<i>Tilletia</i> spp.)					v		SM

82.	Analisis risiko by pest yang telah dilakukan (Fusarium oxysporum fsp. Elaeidis)					v		SM
83.	Analisis risiko by pest yang telah dilakukan (Pseudomonas viridiflava)					v		SM
Undang - Undang								
84.	Data AROPT		Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati			v		SM
85.	NOMOR 24 TAHUN 2007 Tentang PENANGGULANGAN BENCANA	Jakarta, 26 April 2007				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
86.	NOMOR 20 Tahun 1997 Tentang PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Jakarta, 23 Mei 1997				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
87.	NOMOR 4 Tahun 1984 Tentang WABAH PENYAKIT MENULAR	Jakarta, 22 Juni 1984				v	Hingga Masa Berlakunya	SS

88.	NOMOR 25 TAHUN 2009 Tentang PELAYANAN PUBLIK	Jakarta, 18 Juli 2009				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
89.	NOMOR 25 TAHUN 1999 Tentang PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	Jakarta, 19 Mei 1999				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
90.	NOMOR 36 TAHUN 2000 Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG- UNDANG	Jakarta, 21 Desember 2000				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
91.	NOMOR 29 TAHUN 2000 Tentang PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN	Jakarta, 21 Desember 2000				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
92.	NOMOR 18 TAHUN 2009 Tentang PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Jakarta, 4 Juni 2009				v	Hingga Masa Berlakunya	SS

93.	NOMOR 19 TAHUN 2009 Tentang PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN)	Jakarta, 11 Juni 2009				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
94.	NOMOR 39 TAHUN 2008 Tentang KEMENTERIAN NEGARA	Jakarta, 6 November 2008				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
95.	NOMOR 44 TAHUN 2007 Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG- UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG	Jakarta, 1 November 2007				v	Hingga Masa Berlakunya	SS

96.	LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 Tentang LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025	Jakarta, 5 Februari 2007				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
97.	NOMOR 17 TAHUN 2007 Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 - 2025	Jakarta, 5 Februari 2007				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
98.	NOMOR 4 TAHUN 2006 Tentang PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN)	Jakarta, 20 Maret 2006				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
99.	NOMOR 16 TAHUN 1992 Tentang KARANTINA HEWAN, IKAN, dan	Jakarta, 8 Juni 1996				v	Hingga Masa Berlakunya	SS

	TUMBUHAN							
100.	NOMOR 17 TAHUN 2003 Tentang KEUANGAN NEGARA	Jakarta, 5 April 2003				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
101.	NOMOR 15 TAHUN 2004 Tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA	Jakarta, 19 Juli 2004				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
102.	NOMOR 44 TAHUN 2008 Tentang PORNOGRAFI	Jakarta, 26 November 2008				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
103.	NOMOR.5 TAHUN 1990 Tentang KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jakarta, 10 Agustus 1990				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
104.	NOMOR 41 TAHUN 1999 Tentang KEHUTANAN	Jakarta, 30 Septembe r 1990				v	Hingga Masa Berlakunya	SS

105.	NOMOR 9 TAHUN 2004 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA	Jakarta, 29 Maret 2009				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
106.	NOMOR 38 TAHUN 2009 Tentang POS	Jakarta, 14 Oktober 2009				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
107.	NOMOR 1 TAHUN 2009 Tentang PENERBANGAN	Jakarta, 12 Januari 2009				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
108.	NOMOR 31 Tahun 2004 Tentang PERIKANAN	Jakarta, 6 Oktober 2004				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
109.	NOMOR 17 TAHUN 2008 Tentang PELAYARAN	Jakarta, 7 Mei 2008				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
110.	NOMOR 7 TAHUN 1996 Tentang PANGAN	Jakarta, 4 November 1996				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
111.	NOMOR 1 TAHUN 2004 Tentang PERBENDAHARAAN	Jakarta, 14 Januari				v	Hingga Masa Berlakunya	SS

	NEGARA	2004						
112.	NOMOR 24 TAHUN 2000 Tentang PERJANJIAN INTERNASIONAL	Jakarta, 23 Oktober 2000				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
113.	NOMOR 13 TAHUN 2010 Tentang HORTIKULTURA	Jakarta, 24 November 2010				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
114.	NOMOR 12 TAHUN 2010 Tentang GERAKAN PRAMUKA	Jakarta, 24 November 2010				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
115.	NOMOR 11 TAHUN 2010 Tentang CAGAR BUDAYA	Jakarta, 24 November 2010				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
116.	NOMOR 10 TAHUN 2010 Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011	Jakarta, 19 November 2010				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
117.	NOMOR 9 TAHUN 2010 Tentang KEPROTOKOLAN	Jakarta, 19 November				v	Hingga Masa Berlakunya	SS

		2010						
118.	NOMOR 8 TAHUN 2010 Tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	Jakarta, 22 Oktober 2010				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
119.	NOMOR 7 TAHUN 2010 Tentang PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009	Jakarta, 28 Septembe r 2010				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
120.	NOMOR 6 TAHUN 2010 Tentang PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI- PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN	Jakarta, 27 Agustus 2010				v	Hingga Masa Berlakunya	SS

	(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF HIS MAJESTY THE SULTAN AND YANG DI- PERTUAN OF BRUNEI DARUSSALAM ON DEFENCE COOPERATION)							
121.	NOMOR 5 TAHUN 2010 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI	Jakarta, 20 Agustus 2010				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
122.	NOMOR 4 TAHUN 2010 Tentang PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE	Jakarta, 22 Juni 2010				v	Hingga Masa Berlakunya	SS

	TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009)							
123.	PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010	Jakarta, 25 Mei 2010				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
124.	NOMOR 1 TAHUN 2010 Tentang PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008	Jakarta, 1 April 2010				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
125.	NOMOR 14 TAHUN 2002 Tentang PENGADILAN PAJAK	Jakarta, 12 April 2002				v	Hingga Masa Berlakunya	SS

126.	NOMOR 2 TAHUN 2002 Tentang KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 8 Juni 2002				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
127.	NOMOR 15 TAHUN 2002 Tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	Jakarta, 17 April 2002				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
128.	NOMOR 22 TAHUN Tentang MINYAK DAN GAS BUMI	Jakarta, 23 November 2001				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
129.	NOMOR 20 TAHUN 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Jakarta, 21 November 2001				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
130.	PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001	Jakarta, 6 Agustus 2001				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
131.	NOMOR 16 TAHUN 2001 Tentang YAYASAN	Jakarta, 6 Agustus 2001				v	Hingga Masa Berlakunya	SS
Peraturan Pemerintah								

132.	NOMOR 4 TAHUN 2016 Tentang PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN	Jakarta, 14 Maret 2016	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
133.	NOMOR 61 TAHUN 2009 Tentang KEPELABUHANAN	Jakarta, 22 Oktober 2010	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
134.	NOMOR 38 TAHUN 2008 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH	Jakarta, 19 Mei 2008	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
135.	NOMOR 6 TAHUN 2006 Tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH	Jakarta, 14 Maret 2006	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
136.	NOMOR 1 TAHUN 2007 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN	Jakarta, 4 Juni 2007	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

	PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG							
137.	NOMOR 22 TAHUN 2005 Tentang PEMERIKSAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Jakarta, 10 Juni 2005	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
138.	NOMOR 21 TAHUN 2005 Tentang KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK	Jakarta, 19 Mei 2005	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
139.	NOMOR 7 TAHUN 2004 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN	Jakarta, 11 Februari 2004	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
140.	NOMOR 68 TAHUN 2002 Tentang KETAHANAN PANGAN	Jakarta, 30 Desember 2002	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

141.	NOMOR 49 TAHUN 2002 Tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTANIAN	Jakarta, 17 September 2002	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
142.	NOMOR 70 TAHUN 2001 Tentang KEBANDARUDARAAN	Jakarta, 17 Oktober 2001	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
143.	NOMOR 69 TAHUN 2001 Tentang KEPELABUHANAN	Jakarta, 17 Oktober 2001	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
144.	PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG KARANTINA HEWAN	Jakarta, 19 September 2000	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
145.	NOMOR 73 TAHUN 1999 Tentang TATACARA PENGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU	Jakarta, 10 Agustus 1999	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

146.	NOMOR 8 TAHUN 1999 Tentang PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR	Jakarta, 27 Januari 1999	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
147.	No. 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan	Jakarta, 19 Septembe r 2000	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
148.	NOMOR 28 TAHUN 2004 Tentang KEAMANAN, MUTU DAN GIZI PANGAN	Jakarta, 5 Oktober 2004	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
149.	NOMOR 53 TAHUN 2010 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA	Jakarta, 6 Agustus 2008	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
150.	NOMOR 39 TAHUN 2010 Tentang KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK	Jakarta, 15 Juni 2010	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
151.	NOMOR 29 TAHUN 2010 Tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011	Jakarta, 14 Mei 2010	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

152.	NOMOR 24 TAHUN 2010 Tentang KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA	Jakarta, 14 April 2010	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
153.	NOMOR 10 TAHUN 2008 Tentang PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW	Jakarta, 26 Februari 2008	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
154.	NOMOR 8 TAHUN 2006 Tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Jakarta, 20 Maret 2006	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

155.	PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tentang PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Jakarta, 6 Agustus 2010	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
156.	NOMOR 54 TAHUN 2010 Tentang PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Jakarta, 6 Agustus 2010	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
Keputusan Presiden								
157.	NOMOR 109 TAHUN 2001 Tentang UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN	Jakarta, 10 Oktober 2001	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

158.	NOMOR 102 TAHUN 2001 Tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN	Jakarta, 13 September 2001	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
159.	NOMOR 82 TAHUN 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2001	Jakarta, 25 Juni 2001	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

160.	<p>NOMOR 58 TAHUN 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2001</p>	<p>Jakarta, 16 Mei 2001</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
161.	<p>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN</p>	<p>Jakarta, 22 Maret 2001</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

162.	NOMOR 37 TAHUN 2001 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 2000 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2000	Jakarta, 22 Maret 2001	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
163.	NOMOR 177 TAHUN 2000 Tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN	Jakarta, 15 Desember 2000	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
164.	NOMOR 165 TAHUN 2000 Tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN	Jakarta, 23 November 2000	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

165.	NOMOR 18 TAHUN 2000 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH	Jakarta, 21 Februari 2000	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
166.	NOMOR 17 TAHUN 2000 Tentang PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA	Jakarta, 21 Februari 2000	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
167.	NOMOR 6 TAHUN 1999 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1997	Jakarta, 11 Januari 1999	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

168.	<p>PENJELASAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH</p>	<p>Jakarta, 3 November 2003</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
169.	<p>LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2003 TANGGAL 3 NOPEMBER 2003</p>	<p>Jakarta, 3 November 2003</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

170.	LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 80 TAHUN 2003 TANGGAL : 3 NOPEMBER 2003	Jakarta, 3 November 2003	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
171.	NOMOR 80 TAHUN 2003 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Jakarta, 3 November 2003	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
Peraturan Menteri Pertanian								

172.	NOMOR 70/PERMENTAN/KR.100/1 2/2015 Tentang INSTALASI KARANTINA HEWAN	Jakarta, 28 Desember 2015	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
173.	Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2 016 Tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Karantina Tindakan Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jakarta, 11 April 2016	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

174.	<p>Nomor 13/Permentan/KR.040/4/2 016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2 015 Tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan</p>	<p>Jakarta, 11 April 2016</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
175.	<p>Nomor 57/Permentan/PK.110/11/ 2015 Tentang PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Jakarta, 25 November 2015</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

176.	<p>Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2 015 Tentang TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DI TEMPAT PEMERIKSAAN KARANTINA</p>	<p>Jakarta, 25 Maret 2016</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
177.	<p>Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2 015 Tentang PENDAFTARAN PESTISIDA</p>	<p>Jakarta, 10 Juli 2015</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

178.	Lampiran Permentan Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2 012 Tentang Tindakan Karantina Pertanian Terhadap Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Reoublik Indonesia	Jakarta, 13 Juni 2012	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
179.	Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2 012 Tentang Tindakan Karantina Pertanian Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Jakarta, 13 Juni 2012	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

180.	Nomor 104/Permentan/OT.140/8/ 2014 Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hewan	Jakarta, 11 Agustus 2014	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
181.	Nomor 65/Permentan/PD.410/5/2 014 Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi	Jakarta, 12 Mei 2014	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

182.	<p>Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2 015 Tentang TINDAKAN KARANTINA HEWAN DAN TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN KARANTINA DI TEMPAT PEMERIKSAAN KARANTINA</p>	<p>Jakarta, 25 Maret 2015</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
183.	<p>Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2 015 Tentang PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN</p>	<p>Jakarta, 10 Februari 2015</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

184.	<p>Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2 014 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 94/PERMENTAN/OT.140/1 2/2011 TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN KARANTINA</p>	Jakarta, 2 April 2014	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
185.	<p>Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2 014 Tentang TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN</p>	Jakarta, 18 Maret 2014	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

186.	<p>NOMOR 37/Permentan/OT.140/3/2 014 Tentang TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UNGGAS</p>	<p>Jakarta, 14 Desember 2012</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
187.	<p>LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 73/Permentan/OT.140/12/ 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN MILIK PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM</p>	<p>Jakarta, 14 Desember 2012</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

188.	<p>NOMOR: 73/Permentan/OT.140/12/ 2012 Tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA TUMBUHAN MILIK PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM</p>	<p>Jakarta, 14 Desember 2012</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
189.	<p>LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88/Permentan/PP.340/12/ 2011 TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN</p>	<p>Jakarta, 14 Desember 2012</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

190.	Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 Tentang REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA	Jakarta, 24 September 2012	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
191.	Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 Tentang JENIS ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA	Jakarta, 29 Desember 2011	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

192.	Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2 013 Tentang TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN SARANG WALET KE DAN DARI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Jakarta, 21 Maret 2013	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
193.	Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2 012 Tentang REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA	Jakarta, 24 September 2012	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

194.	NOMOR 03/Permentan/OT.140/1/2 012 Tentang REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA	Jakarta, 31 Januari 2012	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
195.	Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/ 2011 Tentang Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Jenis Organisme Penggangu Tumbuhan Karantina	Jakarta, 3 Januari 2012	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

196.	NOMOR 32/Permentan/OT.140/5/2 011 Tentang PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN	Jakarta, 31 Mei 2011	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
197.	NO: 51/Permentan/OT.140/10/ 2006 Tentang PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA FUNGSIONAL PEMERIKSAAN, PENGAMATAN DAN PERLAKUAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA	Jakarta, 17 Oktober 2006	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

198.	<p>NO: 62/Permentan/OT.140/12/ 2006 Tentang PENGAWASAN DAN TINDAKAN KARANTINA TERHADAP PEMASUKAN BAHAN PATOGEN DAN/ATAU OBAT HEWAN GOLONGAN SEDIAAN BIOLOGIK</p>	<p>Jakarta, 7 Juli 2006</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>				<p>v</p>	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	<p>SS</p>
199.	<p>NO: 34/Permentan/OT.140/7/2 006 Tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN</p>	<p>Jakarta, 26 Juli 2006</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>				<p>v</p>	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	<p>SS</p>

200.	<p>LAMPIRAN III NO: 07/Permentan/OT.140/1/2 008 Tentang FORMULIR PERMOHONAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH, BIBIT TERNAK, DAN TERNAK POTONG</p>	<p>Jakarta, 30 Januari 2008</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
201.	<p>LAMPIRAN II NO: 07/Permentan/OT.140/1/2 008 Tentang PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL BENIH DAN BIBIT TERNAK YANG AKAN DIKELUARKAN</p>	<p>Jakarta, 30 Januari 2008</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

202.	<p>LAMPIRAN I NO: 07/Permentan/OT.140/1/2 008 Tentang PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL PEMASUKAN BENIH, BIBIT TERNAK, DAN TERNAK POTONG</p>	<p>Jakarta, 30 Januari 2008</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
203.	<p>NO: 07/Permentan/OT.140/1/2 008 Tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH, BIBIT TERNAK, DAN TERNAK POTONG</p>	<p>Jakarta, 30 Januari 2008</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

204.	LAMPIRAN NO:26/Permentan/OT.140/ 5/2009	Jakarta, 13 Mei 2009	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
205.	NO: 26/Permentan/OT.140/5/2 009 Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN KARANTINA PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) DI PROVINSI BALI	Jakarta, 13 Mei 2009	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

206.	<p>NO: 43/Permentan/OT.140/9/2006 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN</p>	<p>Jakarta, 12 September 2006</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
207.	<p>NO: 07/Permentan/OT.140/2/2011 Tentang PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHENTIAN PEMASUKAN UNGGAS DAN PRODUK UNGGAS DARI NEGARA JEPANG DAN KOREA SELATAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Jakarta, 16 Februari 2011</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

208.	<p>NO: 22/Permentan/OT.140/4/2 008 Tentang PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KARANTINA PERTANIAN</p>	<p>Jakarta, 3 April 2008</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
209.	<p>NO: 20/Permentan/OT.140/3/2 011 Tentang PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL HEWAN DAN/ATAU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DARI NEGARA JEPANG TERHADAP KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF</p>	<p>Jakarta, 31 Maret 2011</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

210.	<p>NO: 18/Permentan/OT.140/3/2 011 Tentang PELAYANAN DOKUMEN KARANTINA PERTANIAN DALAM SISTEM ELEKTRONIK INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)</p>	<p>Jakarta, 8 Maret 2011</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
211.	<p>NO: 21/Permentan/OT.140/2.2 010 Tentang PEMASUKAN HEWAN BABI DAN PRODUKNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Jakarta, 9 Februari 2010</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

212.	<p style="text-align: center;">NO: 20/Permentan/OT.140/2/2 010 Tentang SISTEM JAMINAN MUTU PANGAN HASIL PERTANIAN</p>	<p>Jakarta, 9 Februari 2010</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
213.	<p style="text-align: center;">NO: 13/Permentan/OT.140/1/2 010 Tentang PERSYARATAN RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA DAN UNIT PENANGANAN DAGING (MEAT CUTTING PLANT)</p>	<p>Jakarta, 22 Januari 2010</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

214.	<p>NO: 20/Permentan/OT.140/4/2 009 Tentang PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI</p>	<p>Jakarta, 8 April 2009</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
215.	<p>NO: 37/Permentan/OT.140/7/2 009 Tentang PENGGUNAAN PESTISIDA BERBAHAN AKTIF METIL BROMIDA UNTUK TINDAKAN PERLAKUAN KARANTINA TUMBUHAN DAN PERLAKUAN PRA PENGAPALAN</p>	<p>Jakarta, 30 Juli 2009</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

216.	<p>NO: 38/Permentan/PP.340/8/2 009 Tentang PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 27/Permentan/PP.340/5/2 009 TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN</p>	<p>Jakarta, 18 Agustus 2009</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
217.	<p>NO: 12/Permentan/OT.140/2/2 009 Tentang PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN KEMASAN KAYU KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Jakarta, 9 Februari 2009</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

218.	<p>NO: 09/Permentan/OT.140/2/2 009 Tentang PERSYARATAN DAN TATACARA TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN KARANTINA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Jakarta, 6 Februari 2009</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
219.	<p>NO: 36/Permentan/OT.140/8/2 008 Tentang PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI PENYAKIT AVIAN INFLUENZA PUSAT</p>	<p>Jakarta, 1 Agustus 2008</p>	<p>NO: 36/Permentan/O T.140/8/2008 Tentang PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI PENYAKIT AVIAN INFLUENZA PUSAT</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

220.	<p>NO : 18/Permentan/OT.140/2/2008 Tentang LAMPIRAN PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN HASIL TUMBUHAN HIDUP BERUPA SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Jakarta, 26 Februari 2008</p>	<p>NO : 18/Permentan/O T.140/2/2008 Tentang LAMPIRAN PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN HASIL TUMBUHAN HIDUP BERUPA SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
------	---	--	--	--	--	---	---------------------------------------	----

221.	<p>NO: 18/Permentan/OT.140/2/2 008 Tentang PERSYARATAN DAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN UNTUK PEMASUKAN HASIL TUMBUHAN HIDUP BERUPA SAYURAN UMBI LAPIS SEGAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>Jakarta, 26 Februari 2008</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
222.	Keputusan Menteri Pertanian							
223.	<p>NOMOR 1596/KPTS/KR.040/K/11/ 2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA BRASIL</p>	<p>Jakarta, 8 November 2016</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

224.	<p>NOMOR 1595/KPTS/KR.040/K/11/ 2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JERMAN</p>	<p>Jakarta, 8 November 2016</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
225.	<p>NOMOR 1597/KPTS/KR.040/K/11/ 2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN WILAYAH KEPABEANAN TAIWAN, PENGHU, KINMEN DAN MATSU (THE SEPARATE CUSTOMS TERRITORY OF TAIWAN, PENGHU, KINMEN AND MATSU)</p>	<p>Jakarta, 8 November 2016</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

226.	<p>Nomor 1178/Kpts/KR.040/L/8/20 16 Tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Federasi Rusia</p>	<p>Jakarta, 16 Agustus 2016</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
227.	<p>Nomor 977/KPTS/KR.040/L/7/20 16 Tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Mesir</p>	<p>Jakarta, 1 Juli 2016</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

228.	<p>Nomor 563/Kpts/KR.050/8/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 704/Kpts/KR.050/12/2015 tentang Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Amerika Serikat</p>	<p>Jakarta, 16 Agustus 2016</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
229.	<p>Nomor 976/KPTS/KR.040/2/7/20 16 Tentang Registrasi Laborium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Pakistan</p>	<p>Jakarta, 1 Juli 2016</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

230.	<p>Nomor 968/KPTS/KR.040/L/6/20 16 Tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Jepang</p>	<p>Jakarta, 29 Juni 2016</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
231.	<p>Nomor 967/KPTS/KR.040/L/6/20 16 Tentang Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Chili</p>	<p>Jakarta, 29 Juni 2016</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

232.	<p style="text-align: center;">NOMOR 881/KPTS/KR.040/L/6/20 16 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA CINA</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 16 Juni 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>
233.	<p style="text-align: center;">NOMOR 833/KPTS/KR.040/L/6/20 16 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA UNI EMIRAT ARAB</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 6 Juni 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>

234.	<p style="text-align: center;">NOMOR 725/Kpts/KR.040/L/5/201 6 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA SPANYOL</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 16 Mei 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>
235.	<p style="text-align: center;">NOMOR 721/Kpts/KR.040/L/5/201 6 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA MALAYSIA</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 16 Mei 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>

236.	<p style="text-align: center;">NOMOR 727/Kpts/KR.040/L/5/2016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AUSTRIA</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 16 Mei 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>
237.	<p style="text-align: center;">NOMOR 235/Kpts/KR.050./4/2016 Tentang PENGAKUAN TERHADAP SISTEM KEMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JEPANG</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 11 April 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>

238.	<p style="text-align: center;">NOMOR 237/Kpts/KR.050/4/2016 Tentang PENGAKUAN TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AUSTRALIA</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 11 April 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>
239.	<p style="text-align: center;">NOMOR 236/KPTS/KR.050/4/2016 Tentang PENGAKUAN TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ARGENTINA</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 11 April 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>

240.	<p style="text-align: center;">NOMOR 234/Kpts/KR.050./4/2016 Tentang PENGAKUAN TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA AFRIKA SELATAN</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 11 April 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>
241.	<p style="text-align: center;">NOMOR 474/KPTS/KR.040/L/3/20 16 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA MYANMAR</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 31 Maret 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>

242.	<p style="text-align: center;">NOMOR 439/KPTS/KR.040/L/3/20 16 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA TURKI</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 23 Maret 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>
243.	<p style="text-align: center;">NOMOR 438/KPTS/KR.040/L/3/20 16 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JEPANG</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 23 Maret 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>

244.	<p style="text-align: center;">NOMOR 437/KPTS/KR.040/L/3/20 16 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA YUNANI</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 23 Maret 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>
245.	<p style="text-align: center;">NOMOR 100/KPTS/KR.040/L/1/20 16 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA KOREA SELATAN</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 22 Januari 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>

246.	<p style="text-align: center;">NOMOR 103/KPTS/KR.040/L/I/201 6 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA THAILAND</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 22 Januari 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>
247.	<p style="text-align: center;">NOMOR 229/KPTS/KR.130/L/2/20 16 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA CHINA</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 16 Februari 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>

248.	<p style="text-align: center;">NOMOR 227/KPTS/KR.130/L/02/2 016 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA VIETNAM</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 15 Februari 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>
249.	<p style="text-align: center;">NOMOR 282/KPTS/KR.130/L/2/20 16 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA TUNISIA</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 25 Februari 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>

250.	<p style="text-align: center;">NOMOR 280/KPTS/KR.130/L/2/20 16 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ECUADOR</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 25 Februari 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>
251.	<p style="text-align: center;">NOMOR 281/KPTS/KR.130/L/2/20 16 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA BELGIA</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 25 Februari 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>

252.	<p style="text-align: center;">NOMOR 277/KPTS/KR.130/L/2/20 16 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA BELANDA</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 25 Februari 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>
253.	<p style="text-align: center;">NOMOR 279/KPTS/KR.130/L/2/20 16 Tentang REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA ARGENTINA</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 25 Februari 2016</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p style="text-align: center;">Hingga Masa Berlakunya</p>	<p style="text-align: center;">SS</p>

254.	<p>Nomor 1323/Kpts/PP.340/12/2014 Tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Selandia Baru</p>	<p>Jakarta, 29 Desember 2014</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
255.	<p>Nomor 4484/Kpts/PP.340/7/2013 Tentang Pengakuan Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Negara Kanada</p>	<p>Jakarta, 15 Juli 2013</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

256.	<p>NOMOR 4484/Kpts/PP.340/7/2013 Tentang PENGAKUAN TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA KANADA</p>	<p>Jakarta, 15 Juli 2013</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
257.	<p>NO: 605/Kpts/OT.160/10/2006 Tentang PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMASUKAN HEWAN, BAHAN ASAL HEWAN, HASIL BAHAN ASAL HEWAN DAN PRODUK IKUTANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p>	<p>17 Oktober 2006</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

258.	<p>NO: 473/Kpts/TN.150/8/2002 Tentang PENETAPAN PULAU FLORES DAN PULAU LEMBATA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEBAGAI KAWASAN KARANTINA PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) SERTA PROGRAM PEMBEBASANNYA</p>	<p>Jakarta, 1 Agustus 2002</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
259.	<p>NO: 367/Kpts/PD.640/7/2003 Tentang PERNYATAAN PROPINSI PAPUA BEBAS DARI PENYAKIT ANTHRAX</p>	<p>Jakarta, 15 Juli 2003</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

260.	<p>NO: 892/Kpts/TN.560/9/1997 Tentang PERNYATAAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH BEBAS DARI PENYAKIT ANJING GILA (RABIES)</p>	<p>Jakarta, 5 September 1997</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
261.	<p>NO: 444/Kpts/TN.540/7/2002 Tentang PERNYATAAN PULAU LOMBOK PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT BEBAS DARI PENYAKIT BRUCELLOSIS</p>	<p>Jakarta, 15 Juli 2002</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

262.	<p>NO: 1637.1/Kpts/PD.640/12/2008 Tentang PERNYATAAN BERJANGKITNYA WABAH PENYAKIT ANJING GILA (RABIES) DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI</p>	<p>Jakarta, 1 Desember 2008</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
263.	<p>NO: 1969/Kpts/PD.610/12/2008 Tentang PENETAPAN PROVINSI BALI SEBAGAI KAWASAN KARANTINA PENYAKIT ANJING GILA (RABIES)</p>	<p>Jakarta, 12 Desember 2008</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

264.	NO: 1096/Kpts/TN.120/10/199 9 Tentang PEMASUKAN ANJING, KUCING, KERA DAN HEWAN SEBANGSANYA KE WILAYAH/DAERAH BEBAS RABIES DI INDONESIA	Jakarta, 13 Oktober 1999	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
265.	NO: 566/Kpts/PD.640/10/2009 Tentang PERNYATAAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, BANTEN DAN JAWA BARAT BEBAS DARI PENYAKIT ANJING GILA (RABIES)	Jakarta, 6 Oktober 2009	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

266.	LAMPIRAN II NO: 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang PENGGOLONGAN DAN KLASIFIKASI MEDIA PEMBAWA	Jakarta, 9 Septembe r 2009	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS
267.	LAMPIRAN I NO: 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang PENGGOLONGAN JENIS-JENIS HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA	Jakarta, 9 Septembe r 2009	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS

268.	<p style="text-align: center;">NO: 3238/Kpts/PD.630/9/2009 Tentang PENGGOLONGAN JENIS-JENIS HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA, PENGGOLONGAN DAN KLASIFIKASI MEDIA PEMBAWA</p>	<p>Jakarta, 9 Septembe r 2009</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS
269.	<p>LAMPIRAN II NO: 3237/Kpts/HK.060/9/2009 Tentang SEGEL</p>	<p>Jakarta, 9 Septembe r 2009</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas</p>			v	<p>Hingga Masa Berlakunya</p>	SS

270.	LAMPIRAN I NO: 3237/Kpts/HK.060/9/2009 Tentang NOTIFICATION OF NON COMPLIANCE DAN PEDOMAN PENGGUNAAN DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN	Jakarta, 9 Septembe r 2009	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS	
271.	NO: 3237/Kpts/HK.060/9/2009 Tentang BENTUK DAN JENIS DOKUMEN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	Jakarta, 9 Septembe r 2009	Bagian Hukum dan Humas			v	Hingga Masa Berlakunya	SS	
H. PPID BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI									
272.	Profil Balai	BBIB Singosari, Desember 2015	Kepala Balai, Tim ISO 9001:2008, Bidang PI dan Bidang Pelayanan			v	v	Selama masih berlaku, revisi jika ada perubahan	BK

			Teknis					
273.	Struktur organisasi	BBIB Singosari, Desember 2016	Kepala Balai, SB Kepegawaian dan TU		v	v	Selama masih berlaku, revisi jika ada perubahan	BK
274.	Maklumat Layanan	BBIB Singosari	Kepala Balai dan ISO 9001:2008		v	v	Selama masih berlaku, revisi jika ada perubahan	BK
275.	Program Kerja dan Kegiatan yang sedang berjalan	BBIB Singosari, Desember 2015	Kepala Balai, SB Program dan Keuangan		v	v	1 tahun	BK
276.	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	BBIB Singosari, Desember 2015	PPK, Panitia Pengadaan, Pokja Pengadaan		v	v	1 tahun	BK
277.	LAKIN 2015	BBIB Singosari, Januari 2016	SB Program dan Keuangan		v	v	3 tahun	Berkala : Hijau

278.	LAKIN 2015	BBIB Singosari, Januari 2016	Co :SB Kepegawaian dan TU, seluruh PJ Kegiatan/ bidang		v	v	3 tahun	Berkala : Hijau
279.	Laporan Tahunan Kegiatan Balai 2015	BBIB Singosari, Januari 2016	Tim PPID		v	v		Berkala : Hijau
280.	Laporan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2015	BBIB Singosari, Agustus 2016	SB Kepegawaian dan TU		v	v		Berkala : Hijau
281.	Laporan IPNBK tahun 2016	Tahunan : Januari 2016	TIM UPG		v	v		Berkala : Hijau
282.	Laporan Penerimaan Gratifikasi Tahun 2015	April, Juli, Oktober 2016	TIM UPG		v	v		Berkala : Hijau
283.	Laporan Penerimaan Gratifikasi triwulan I-III 2016	Setiap bulan, Februari-November 2016	TIM UPG		v	v		Berkala : Hijau

284.	Laporan Penerimaan Gratifikasi Bulan Januari-Oktober 2016	Setiap bulan	SB Kepegawaian dan TU		v	v		Berkala : Hijau
285.	Laporan Bulanan Kegiatan Balai	Setiap bulan	SB Kepegawaian dan TU		v	v		Berkala : Hijau
286.	Laporan Bulanan Quick Wins	BBIB Singosari, Juli 2016	Tim Dumas		v	v		Berkala : Hijau
287.	Laporan Pengaduan Masyarakat Semester I tahun 2016	BBIB Singosari, Januari 2016	Tim Satlak PI		v	v		Berkala : Hijau
288.	Laporan Kegiatan Satlak PI Tahun 2015	BBIB Singosari, April, Juli, Oktober 2016	Tim Satlak PI		v	v		Berkala : Hijau
289.	Laporan Kegiatan Satlak PI triwulan I-III 2016	BBIB Singosari, Februari-November 2016	Tim Satlak PI		v	v		Berkala : Hijau

290.	Laporan Kegiatan Satlak PI bulan Januari- Oktober 2016	BBIB Singosari, Juli 2016	Seksi Informasi dan Pemantauan Mutu Semen		v	v		Berkala : Hijau
291.	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I tahun 2016	BBIB Singosari, Tanggal 30 Juni 2016	SB Rumah Tangga dan Perlengkapan (BMN)		v	v		
292.	Laporan neraca BMN semester I 2016	BBIB Singosari, Tanggal 30 Juni 2016	SB Rumah Tangga dan Perlengkapan (BMN)		v	v		
293.	Laporan Intra komptable	BBIB Singosari, Tanggal 30 Juni 2016	SB Rumah Tangga dan Perlengkapan (BMN)		v	v		
294.	Laporan Extra komptable	BBIB Singosari, Tanggal 30 Juni 2016	SB Rumah Tangga dan Perlengkapan (BMN)		v	v		
295.	Laporan Gabungan Intra dan Extra komptable	BBIB Singosari, Januari 2016	SB Program dan Keuangan		v	v		Berkala : Hijau

296.	Laporan Keuangan SAK BLU Semester I	BBIB Singosari, Juli 2016	SB Program dan Keuangan		v	v		Berkala : Hijau
297.	Laporan Keuangan SAP Semester I	BBIB Singosari, Tanggal Juli 2016	SB Program dan Keuangan		v	v		Berkala : Hijau
298.	Laporan Monitoring Evaluasi Kinerja Bulanan, Triwulan, semester	BBIB Singosari, Tanggal Juli 2016	SB Program dan Keuangan		v	v		Berkala : Hijau
299.	Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014	Jakarta, Tahun 2014	Kepala Bidang Pelayanan Teknis		v		5 tahun setelah tidak berlaku/ Sampai dengan ditetapkan yang baru	SM
300.	Petunjuk Teknis Penanggulangan Penyakit Hewan	Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian	Kepala Bidang Pelayanan Teknis, Medik dan paramedik veteriner		v			SM

		Pertanian, Tahun 2014						
301.	Petunjuk Teknis Pengendalian Penyakit Hewan Tahun 2014	Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Tahun 2015	Kepala Bidang Pelayanan Teknis, Medik dan paramedik veteriner		v			SM
302.	Rencana Bisnis dan Anggaran 2016		SB Program dan Keuangan		v	v		SS
303.	RKA-K/L 2016							SS
304.	DIPA 2016							SS
305.	POK 2016							SS

306.	RKA-K/L 2016							SS
307.	Sasaran Mutu Balai							SS
308.	Sasaran Mutu Bidang							SS
309.	Dokumen Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Sumur Bor	PPK, BMN			v	v		DK
310.	Laporan kegiatan hasil surveillance							DK
311.	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2016							DK
I. BALAI BESAR PENELITIAN PADI								
312.	Renstra 2015-2019	BB Padi		Kepala BB Padi		v	Terbuka	

313.	DIPA tahun anggaran 2016	BB Padi		Kepala BB Padi			Terbuka	
314.	LAKIP 2010-LAKIN 2016	BB Padi		Kepala BB Padi			Terbuka	
315.	Penetapan Kinerja	BB Padi		Kepala BB Padi			Terbuka	
316.	(PK) 2010-2016	BB Padi		Kepala BB Padi			Terbuka	
317.	IKM 2013-2016	BB Padi		Kepala BB Padi			Terbuka	
318.	Pengumuman Lelang	BB Padi		Kepala BB Padi			Terbuka	